

Nama : Rahma Dwi Gishela

NPM : 2413031038

Kelas : 24B

CASE STUDY PERTEMUAN 4 TEORI AKUNTANSI

1. Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.

Jawab: PT Garuda Sejahtera memilih nilai wajar (fair value) sebagai dasar pengukuran pesawat karena dianggap lebih relevan dan sesuai dengan kerangka IFRS yang menekankan *substance over form*. Nilai wajar dinilai lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi terkini dan sesuai dengan tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi bermanfaat bagi pengambilan keputusan investor, khususnya investor global. Dari sisi teori, pendekatan ini memang dapat memperlihatkan gambaran nilai aset yang lebih aktual dibandingkan biaya historis.

Namun, penerapannya di Indonesia tidak terlepas dari kendala. Pasar pesawat di dalam negeri relatif terbatas sehingga nilai wajar sulit ditentukan melalui transaksi aktif. Akibatnya, penilaian lebih banyak bergantung pada asumsi atau model estimasi yang bersifat subjektif, sehingga menurunkan tingkat *faithful representation*. Auditor yang menyarankan penggunaan biaya historis menekankan prinsip *prudence* dalam PSAK, karena *historical cost* lebih mudah diverifikasi, lebih objektif, dan sesuai dengan kondisi pasar lokal.

Dengan demikian, relevansi nilai wajar memang dapat diakui secara konseptual, tetapi keterandalan informasi menjadi tantangan besar dalam konteks Indonesia. Untuk dapat diterima, penggunaan nilai wajar perlu didukung oleh data pasar yang kredibel, metode valuasi independen, dan pengungkapan yang transparan. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, pendekatan biaya historis justru lebih sesuai dengan prinsip kerangka konseptual PSAK, terutama terkait kehati-hatian dan keandalan informasi.

2. Bandingkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:
 - a. Tujuan laporan keuangan
 - b. Karakteristik kualitatif informasi

- c. Basis pengukuran
- d. Asumsi entitas dan kelangsungan usaha

Jawab:

Aspek	PSAK Indonesia	IFRS	Perbedaan Utama
Tujuan Laporan Keuangan	Menyediakan informasi bermanfaat bagi pengemabilan keputusan ekonomi dan menunjukkan akuntabilitas manajemen terhadap sumber daya.	Menyediakan informasi yang relevan terutama bagi investor, kreditor, dan pihak eksternal untuk pengambilan Keputusan.	PSAK menekankan akuntabilitas, IFRS lebih investor oriented.
Karakteristik kualiatatif	Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami	Relevan, faithful representation, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dengan tambahan verifiability & timeliness.	PSAK pakai istilah andal/reliability, IFRS pakai faithful representation.
Basis Pengukuran	Utamanya historical cost, nilai wajar dipakai terbatas pada standar tertentu.	Lebih mengutamakan fair value, terutama untuk instrument keuangan dan asset.	PSAK lebih konservatif, IFRS lebih menekankan relevansi.
Asumsi Entitas & Going Concern	Menggunakan entity assumption dan going concern sebagai dasar laporan.	Sama: entity assumption dan going concern.	Hampir tidak ada perbedaan signifikan.

3. Apakah anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat anda dengan argumen kritis, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan Tingkat kematangan pasar di Indonesia.

Jawab: Indonesia tidak sepenuhnya bisa langsung mengikuti kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal. Di satu sisi, adopsi penuh IFRS memang bermanfaat karena meningkatkan daya banding internasional, memudahkan akses investor global, dan mempercepat integrasi pasar keuangan Indonesia dengan standar global. Hal ini bisa membantu menarik modal asing dan meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan Indonesia.

Namun, ada kondisi khusus di Indonesia yang perlu dipertimbangkan. Pasar keuangan Indonesia masih berkembang, likuiditas di banyak sektor rendah, dan ketersediaan data pasar yang valid terbatas. Jika IFRS diadopsi mentah-mentah, terutama penggunaan nilai wajar yang dominan, justru bisa menimbulkan masalah kurangnya keterandalan informasi karena pengukuran lebih bergantung pada estimasi daripada data pasar yang nyata. Selain itu, faktor sosial, seperti tingkat literasi keuangan pelaku usaha kecil dan menengah membuat penerapan IFRS penuh bisa terasa “memaksa” dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

Karena itu, pendekatan yang lebih tepat bagi Indonesia adalah konvergensi dengan IFRS secara bertahap dengan tetap melakukan penyesuaian local. Artinya, prinsip utama IFRS tetap diikuti, tetapi diselaraskan dengan konteks ekonomi, sosial, serta kematangan pasar domestik. Dengan cara ini, laporan keuangan tetap relevan secara global namun tetap andal dan aplikatif dalam kondisi Indonesia.